



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung Keuangan Negara A Lantai I Telp. (0651) 22460
Jalan Tgk. Chik Di Tiro Banda Aceh Faks. (0651) 22460

Nomor : S-~~2016~~/WPB.01/KP.01/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Monitoring Kesiapan Penyampaian Dokumen Persyaratan
Penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan DAK Fisik Sekaligus
TA 20174 dan Update Perekaman Data Kontrak

25 Agustus 2017

Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Sabang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Besar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie Jaya
Di tempat

Sehubungan dengan PMK nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor S-7295/PB.2/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Monitoring Perkembangan Penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan DAK Fisik Sekaligus Tahun 2017 dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sekaligus oleh Pemda paling lambat tanggal **31 Agustus 2017**, berupa daftar kontrak kegiatan;
2. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Triwulan II oleh Pemda paling lambat tanggal **31 Agustus 2017**, berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output disertai dengan rekapitulasi SP2D; dan
 - b. Daftar Kontrak Kegiatan.
3. Bagi bidang-bidang yang **telah** disalurkan pada 31 Juli 2017, **wajib** melakukan *update* data kontrak untuk mengganti data "rencana" menjadi "kontraktual/swakelola" paling lambat **31 Agustus 2017**. Daftar kontrak yang direkam tersebut akan menjadi dasar perhitungan penyaluran DAK Fisik Triwulan IV dan dikompilasi dengan rincian kebutuhan dana untuk penyelesaian output sebesar 100%;
4. Bagi bidang-bidang yang **belum** disalurkan pada tanggal 31 Juli 2017, batas waktu penyampaian dokumen sesuai dengan poin 1 dan 2 diatas, **wajib** melakukan perekaman data kontrak dengan pilihan "kontraktual/swakelola" paling lambat tanggal **31 Agustus 2017**. Daftar Kontrak yang direkam tersebut akan menjadi dasar perhitungan penyaluran DAK Fisik Triwulan IV dan dikompilasi dengan rincian kebutuhan dana untuk penyelesaian output sebesar 100%;
5. Bagi bidang yang berpotensi menjadi tidak siap salur, Pemda **wajib** menyampaikan keterangan/alasan tertulis yang menjelaskan penyebab tidak dapat terpenuhinya persyaratan penyaluran sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Ahmad Fauzi

NIP. 196511301985091001

Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

**Laporan Hasil Identifikasi Jenis/Bidang DAK Fisik yang Diprediksi tidak Memenuhi Syarat
Penyaluran DAK Fisik Triwulan II Tahun 2017
KPPN Banda Aceh**

No	NAMA PEMDA	JENIS	BIDANG	PAGU DIPA	REALISASI TRIWULAN I	REALISASI s.d TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	PAGU TRIWULAN II (25% dari PAGU DIPA)	POTENSI TIDAK SIAP SALUR	Keterangan/Alasan Tidak Siap Salur
1	2	3	4	5	6	7 = (6+8)	8	9	10 = (9-8)	11
1	Provinsi/Kab/Kota	DAK Reguler	Pendidikan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Reguler	Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Reguler	Perumahan dan Pemukiman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Reguler	Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Reguler	Kelautan dan Perikanan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Reguler	Sentra Industri Kecil Menengah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Reguler	Pariwisata	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Pendidikan SMK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Air Minum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Sanitasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Pasar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Penugasan	Energi Sekala Kecil	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Afirmasi	Perumahan dan Pemukiman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Afirmasi	Transportasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		DAK Afirmasi	Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

Banda Aceh, Agustus 2017
Kepala BPKD Prov/Kab/Kota

Nama
NIP